

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SEKTOR PERTANIAN DALAM KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG GUNA MENDUKUNG KESIAPAN LOGISTIK WILAYAH PERTAHANAN

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN FOOD SECURITY IN SUMEDANG REGENCY TO SUPPORT THE DEFENSE TERRITORIAL LOGISTICS

Jihan Marha¹, George Royke Deksin², Pribadijono³

PRODI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA¹²³

Jihanmarhaa@gmail.com¹, georgeroykedeksino@gmail.com²,
pribadijono@yahoo.com³

Abstrak – Penelitian ini dilatar belakangi oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang bersifat semesta. Pembangunan pertahanan harus memperhatikan kesiapan logistik wilayahnya. Ketahanan pangan merupakan salah satu upaya dalam membangun kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan. Hal ini dilakukan oleh Kodim 0610/Sumedang yang bersinergis dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Tani. Peneliti merumuskan masih terdapat fenomena yang menjadi permasalahan diantaranya dalam pengadaan saprotan (Sarana Produksi Pertanian), distribusi, kebijakan pemerintah dan penggunaan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *supply chain management* (SCM), hambatan dan strategi SCM sektor pertanian dalam ketahanan pangan Kabupaten Sumedang guna mendukung kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Sumedang sudah mampu memenuhi parameter ketersediaan stok pangan namun masih memiliki kendala dalam parameter keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi; (2) berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hambatan untuk ketersediaan stok (ketidakmandirian petani), keterjangkauan harga (rendahnya daya beli masyarakat, petani tidak memiliki daya tawar, tingginya tingkat kemiskinan petani dan biaya faktor produksi) dan kelancaran distribusi (lembaga non formal masih menguasai pasar, kurangnya sinergisitas antar instansi pemerintah dan distribusi yang kurang efektif); (3) strategi yang dapat dilaksanakan menggunakan strategi SCM yaitu ketersediaan stok (pembukaan lahan, tumpangsari dan integrated Farming), keterjangkauan harga (pemutusan rantai pasok, memaksimalkan peran bulog) dan kelancaran distribusi (pemasaran, pengembangan sistem distribusi dan pemanfaatan teknologi). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kabupaten Sumedang masih memiliki banyak hambatan dalam ketahanan pangan sehingga perlu adanya strategi SCM guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Logistik Wilayah Pertahanan, Ketahanan Pangan, Sektor Pertanian, Supply Chain Management

Abstract – – The research background is Law Number 3 of 2002 concerning National Defense which is universal. Defense development takes into account the logistical readiness of its territory. Food security is one of the efforts in building the readiness of the Defense Area Logistics. This was carried out by Kodim 0610/Sumedang in synergy with the Regional Government and Farmer Groups. Researchers formulate that there are still phenomena that are problems including in the procurement of Agricultural Production Facilities, distribution, government policies and the use of

technology. This study aims to analyze supply chain management (SCM), obstacles and SCM strategies for the agricultural sector in Sumedang Regency food security to support the readiness of the Defense Region Logistics. The research method uses a qualitative approach with an analytical descriptive research design. The results of the study show that: (1) Sumedang Regency is able to meet the parameters of stock availability but has problems in terms of price affordability and smooth distribution; (2) researchers formulate obstacles to stock availability (farmers' independence), price affordability (low public purchasing power, farmers have no bargaining power, high farmer poverty and production factor costs) and smooth distribution (non-formal institutions still control the market, lack of synergy between less effective government agencies and distribution); (3) strategies that can be implemented using the SCM strategy are stock availability (land clearing, intercropping and integrated farming), price affordability (supply chain termination, maximizing the role of Bulog) and smooth distribution (marketing, distribution system development and technology utilization). The conclusion is that Sumedang Regency still has many obstacles in terms of food security so that there is a need for an SCM strategy to support the logistical readiness of the defense area of the Republic of Indonesia.

Keywords: Defense Territorial Logistics, Food Security, Supply Chain Management, The Agricultural Sector

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pembangunan pertahanan sebagai daya dan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, merupakan hal penting yang harus dibangun secara berkesinambungan. Tujuan dari pertahanan negara adalah melindungi keselamatan, keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari gangguan dan ancaman yang akan muncul di masa depan. Ancaman yang Bersifat aktual maupun potensial merupakan sebuah landasan dasar dalam

pembentukan sistem pertahanan negara (Manggala, 2016).

Arah pembangunan pertahanan tidak hanya berfokus pada ancaman militer namun juga ancaman non militer. UU Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan “bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Salah satu peran penyiapan wilayah adalah persiapan dan pengelolaan sumber daya nasional guna mendukung pertahanan negara. Penyiapan wilayah pada dasarnya diarahkan untuk menyiapkan wilayah agar dapat memberikan keuntungan sebesar-

besarnya bagi kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara, khususnya dalam kepentingan damai ataupun kepentingan perang (Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Pembangunan pertahanan yang dilakukan pada setiap wilayah mengharuskan kesiapan logistik setiap wilayah tersebut. Logistik wilayah yang dapat didayagunakan guna kepentingan pertahanan negara adalah wilayah yang disiapkan bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan sebagai potensi pada wilayah tersebut (Kusuma et al, 2021). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penyiapan logistik wilayah pada dasarnya sama dengan proses penyiapan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan.

Hal ini juga didukung oleh unsur utama postur pertahanan nirmiliter, yaitu kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara. Ketahanan pangan merupakan salah satu upaya dalam membangun kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan. Wilayah yang memiliki kesiapan logistik yang baik harus mampu membangun ketahanan pangan yang kuat pada wilayah pertahanan tersebut (Pitaloka et al, 2021). Khususnya TNI AD yang memiliki peran dalam proses penyiapan, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya dapat terselenggara secara efektif guna pemenuhan kebutuhan kekuatan terpusat dan kewilayahan harus mampu bersinergis dalam membangun ketahanan pangan pada suatu daerah. Ketahanan pangan yang kuat pada wilayah tertentu dapat membangun

kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan baik untuk kebutuhan operasi maupun pasca operasi (Kurnia, Sundari, et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu yang menerapkan sistem agraris. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistika (2021) yang menyatakan luas lahan sawah di Indonesia lebih dari 10 juta Hektar yang menghasilkan produk pertanian. Peran sektor pertanian pada pembangunan negara Indonesia cukup penting karena harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu bertambah.

Keunggulan dari Indonesia pada sektor pertanian, yaitu memiliki potensi dalam letak geografi yang strategis dan memiliki iklim tropis dengan penyinaran matahari sepanjang tahun (Kurnia, Sundari, et al., 2020). Meskipun hal tersebut, ancaman pada ketahanan pangan masih ada hingga saat ini. Negara Indonesia belum dapat menghentikan kegiatan impor dan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok.

Tabel 1. Total Impor Beras dari Negara-Negara Utama 2015-2020

No	Tahun	Berat Bersin (Ton)	Nilai 000 US\$	CIF:
1	2015	861.601,0	351.602,1	
2	2016	1.283.178,5	531.841,6	
3	2017	305.274,6	143.641,7	
4	2018	2.253.824,5	1.037.128,4	
5	2019	444.508,8	184.254,1	
6	2020	356.286,3	195.409,0	

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2020

Terdapat dalam tabel impor salah satu bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengalami

data yang dinamis. Terjadi kenaikan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun selanjutnya. Meskipun impor yang dilakukan Indonesia mengalami penurunan, namun jumlah beras yang belum terpenuhi oleh hasil budidaya dalam negeri cukup besar. Mengingat negara ini merupakan negara agraris yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Tidak hanya melakukan impor beras namun Indonesia juga masih melakukan impor jagung yang merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia setelah beras dari beberapa negara. Hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Total Impor Jagung dari Negara-Negara Utama 2021

Negara	Berat Bersin (Ton)	Nilai CIF: 000 US\$
Argentina	610.000	186.260
Brasil	175.800	47.620
Amerika Serikat	147.570	41.000
Thailand	32.540	12.000
Lain-lain	30.080	10.420
Total	995.990	297.300

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2021

Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah negara dalam membangun ketahanan pangan nasional. Selain hal tersebut, Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2017) menyebutkan bahwa angka rawan pangan di Indonesia masih tergolong dalam kategori cukup tinggi walaupun setiap tahunnya terus mengalami penurunan seperti pada grafik berikut.

Suharyanto (2011) menyatakan kerawanan pangan yang terjadi pada

negara Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti ketimpangan akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, infratraktur yang masih belum efisien, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang sulit menjangkau oleh seluruh wilayah konsumen, kemampuan produksi pangan yang berbeda-beda pada setiap wilayah, persediaan pangan yang cukup setiap tahunnya masih sulit dipenuhi akibat musim yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sinergisitas pemerintah, lembaga maupun masyarakat dalam membangun ketahanan pangan yang dapat mendukung kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan.

TNI angkatan darat memiliki tugas pembinaan wilayah pertahanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan membangun sarana prasarana khusus (Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Hal tersebut terlaksana pada daerah Sumedang, Kodim 0610/Sumedang melakukan sinergisitas dengan kelompok tani di Blok Pasir Peusing Desa Naluk kecamatan Cimalaka untuk mewujudkan binter yang adaptif melalui “pembinaan ketahanan pangan di wilayah pada masa pandemi Covid-19”. Program ini dilaksanakan dengan melakukan budidaya jagung dan padi pada lahan demplot milik Kodim 0610/Sumedang seluas 1 hektar. Selain itu sinergisitas Kodim 0610/Sumedang dengan Kelompok Tani Parigi Mukti dalam melakukan budidaya padi di demplot milik Kodim 0610/Sumedang pada Kelurahan Pasanggrahan baru, Kecamatan Sumedang Selatan.

Kabupaten Sumedang salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi komoditas pangan unggulan. Komoditas pangan unggulan tersebut adalah ubi cilembu (Azhar et al., 2021). Luas Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.871,98 dengan 26 kecamatan yang terbagi menjadi 270 desa dan 7 kelurahan (Bappeda, 2021).

Kabupaten Sumedang dengan ketinggian tempat antara 25 m–1.667 m di atas permukaan laut yang didominasi oleh daerah berbukit dan gunung kecuali bagian wilayah utara yang didominasi oleh daratan rendah. Luas lahan yang terdapat di Kabupaten Sumedang terbagi menjadi sawah sebanyak 21,95%, luas lahan berupa tegal / kebun sebanyak 23,04%, luas lahan berupa Hutan Negara sebanyak 29,78% dan hutan rakyat sebesar 8,96% yang siap diolah. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat lebih dari 50% luas wilayah Kabupaten Sumedang dijadikan untuk potensi sektor

kehutanan dan pertanian (Bappeda, 2021). Berdasarkan topografi Kabupaten Sumedang ini memiliki potensi yang besar untuk membangun ketahanan pangan yang dapat mendukung kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan negara. Berdasarkan pada produksi tanaman pangan Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa daerah memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Jumlah produksi beberapa tanaman pangan Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

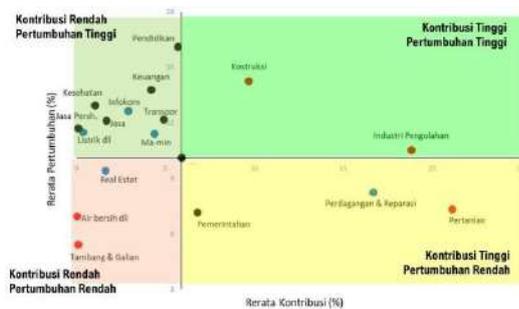
Tabel 3. Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2017

No	Pangan Utama	Produksi (Ton)
1	Padi	373.125
2	Ubi Jalar	167.477
3	Ubi Kayu	153.292
4	Kacang Hijau	1.539
5	Kacang Tanah	9.950
6	Kedelai	7.414
; Jagung		90.937

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, 2017

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Sumedang harus terus meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok tersebut. Begitu pula dengan jagung dengan permintaan pasar sekitar 20 ton per hari yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Sumedang (DPKP, 2020).

Daerah Sumedang yang memiliki topografi dan iklim yang cocok untuk tanaman pangan merupakan modal yang besar untuk meningkatkan produksi pangan daerah (Ritonga, 2018). Berdasarkan laporan akhir kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) kabupaten Sumedang dan Universitas Padjadjaran (2020) menyatakan 21,2% bersumber dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan berkontribusi terhadap struktur ekonomi Jawa Barat yang terus konsisten dan mengalami peningkatan, namun di sisi lain laju pertumbuhannya masih tergolong rendah seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Klasifikasi Performa Ekonomi Kab. Sumedang

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang dan Universitas Padjadjaran (2020)

Sumber daya alam yang memadai menunjukkan Kabupaten Sumedang memiliki potensi untuk meningkatkan hasil produksinya. Produktivitas yang kurang, nilai tukar petani, dan penyusutan lahan menimbulkan kemiskinan yang harus dipecahkan (Muhandhis & Suryani, 2015).

Penggunaan teknologi yang masih rendah karena pengetahuan dan informasi yang masih sulit diakses oleh para petani. Rantai pasok yang masih Panjang pun menimbulkan nilai tukar petani yang masih rendah. Pembelian produk pertanian oleh tengkulak sering kali menyulitkan para petani untuk meningkatkan pendapatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmikayati et al., (2021) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah kepastian pasar dan fluktuasi harga yang ditawarkan pasar, rendahnya harga saat musim panen raya dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan petani. Selain hal tersebut pengadaan sarana produksi pertanian (Saprotan) khususnya pupuk masih sering menjadi permasalahan bagi petani, pendistribusian pupuk yang masih sulit, ketidaksesuaian harga eceran dengan

Harga Eceran Tinggi (HET) maupun kecurangan penyusunan laporan penjualan (Lutfiyanto & Prihantini, 2019). Petani Kabupaten Sumedang lebih memilih untuk membeli pupuk non subsidi dengan harga beberapa kali lipat dengan pupuk subsidi, karena pupuk yang disediakan pihak pemerintah kurang bagus untuk kualitas hasil pertanian (Yuningsih & Yuliani, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2011) dalam menyelesaikan permasalahan petani perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan kelembagaan dalam rintisan kearah kemitraan dari hulu (produsen input), maupun hilir (pengelola, pemasaran hingga akses pasar) untuk menghindari risiko fluktuasi harga (price fluctuation risk).

Rantai pasok adalah teknik yang diaplikasikan dalam pengelolaan logistik dengan pelaku-pelaku yang turut andil dalam aktivitas bisnis dan menjadi aliran dari mata rantai dari mulai penyedia bahan baku hingga menjadi produk siap pakai (Siswandi et al., 2019). Rantai pasok ini berjalan secara terus menerus, seperti produk yang mengalir dari hulu ke hilir, uang yang mengalir dari hilir ke hulu dan informasi yg mengalir keduanya (Ceha, R., et al, 2019). Berdasarkan hal tersebut diperlukan manajemen rantai pasok untuk membangun pertanian yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan yang muncul.

Menurut Folkerts and Koehorst dalam Woods (2013) *supply chain management focuses on managing in a series starting from the production,*

distribution, and marketing processes to meet the needs and desires of consumers.

Dapat disimpulkan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) merupakan suatu teknik integrasi dalam aktivitas- aktivitas yang dilakukan pelaku rantai pasok untuk pengadaan bahan baku di level manufacturing hingga menjadi barang jadi atau siap pakai yang selanjutnya didistribusikan kepada konsumen secara efektif dan efisien.

Permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh *supply chain management* sektor pertanian komoditas pangan khususnya padi dan jagung yang dilakukan oleh Kodim 0610/Sumedang dengan Kelompok Tani Parigi Mukti dan Sari Wangi. Pembatasan penelitian terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Ketersediaan Stok (*Availability*), hal ini berfokus pada pelaku rantai pasok di hulu;
- b. Keterjangkauan Harga (*Affordability*);
- c. Kelancaran Distribusi (*Continuity*), hal ini berfokus pada pelaku rantai pasok hingga hilir.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang bertema “*supply chain management* sektor pertanian dalam ketahanan pangan Kabupaten Sumedang guna mendukung kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui desain penelitian deskriptif analisis kualitatif. Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan

suatu fenomena dari pandangan partisipan untuk membentuk suatu makna. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan, melukiskan dan memaparkan keadaan objek secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada lapangan. Pendekatan kualitatif juga menyediakan pemaparan komprehensif terkait apa yang menjadi kesenjangan dari *das sein* dan *das sollen* yang timbul pada objek penelitian berdasarkan teori dan data yang diperoleh di lapangan. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dari hasil wawancara dan observasi saat penelitian secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang absah dilakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi data, sumber dan metode, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan didasarkan pada analisis dan interpretasi data yang dihubungkan dengan berbagai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan membahas hasil penelitian terhadap fokus masalah yang menjadi obyek penelitian *supply chain management* sektor pertanian dalam membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan.

Hasil Analisis terhadap Supply Chain Management Sektor Pertanian dalam Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Menurut Yuningsih & Yuliani (2021) menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya

pangan individu masyarakat pada sebuah negara dengan persediaan yang cukup, baik berupa jumlah, mutu, keamanan, gizi maupun kualitas pangan tersebut. Membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang salah satunya dengan manajemen rantai pasok. Supply chain management pertanian terus mengalami perkembangan sebagai disiplin penelitian sendiri yang mencakup area lokal, regional, nasional hingga internasional. SCM pertanian bertujuan untuk memastikan pasokan yang memenuhi kebutuhan dengan kualitas yang baik (Quaralia, 2022).

SCM pertanian bersifat kompleks dan terus mengalami perubahan, dengan kondisi arus produk dan biaya transportasi dapat menurun, keamanan pangan mengalami peningkatan dan jaringan rantai pasok semakin efisien (Accorsi & Manzini, 2019).

Kabupaten Sumedang sudah dapat mampu menyediakan ketersediaan stok pangan untuk kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sumedang, namun ada beberapa bagian seperti keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi yang masih memiliki kendala yang harus dilakukan strategi untuk mencapai manajemen rantai pasok yang utuh. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan kondisi saat ini dan manajemen rantai pasok yang seharusnya sehingga dapat membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang.

Hasil Analisis terhadap Ketersediaan Stok (Availability)

Perusahaan yang berorientasi product focus menjalankan beberapa proses operasi untuk menghasilkan sebuah barang (Martono, 2020).



Grafik 1. Jumlah Produksi Padi Tahun 2018- 2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Kabupaten Sumedang dalam memenuhi kebutuhan pangannya dari beberapa komoditas sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya khususnya pada komoditas padi dan jagung. Hal ini dapat terlihat dari grafik produksi padi tahun 2018-2021 yang menunjukkan jumlah pangan yang diproduksi sangat tinggi meskipun grafik menunjukkan penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Ini juga menunjukkan supply pangan khususnya komoditas beras tinggi. Selain hal tersebut, demand untuk bahan pangan pun lebih rendah dari supply yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang, sehingga manajemen resiko pada ketersediaan stok pangan khususnya komoditas beras dapat optimal. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Pertanian yang melakukan kerja sama dengan BUMD untuk melakukan pemasaran beras ke Pasar Caringin dan Pasar Cipinang dalam memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Jakarta. Hal

ini dilakukan karena kebutuhan wilayah sudah dapat terpenuhi dan stok komoditas beras masih sangat banyak sehingga mampu melakukan pemasaran keluar wilayah

Selain itu, ketersediaan stok yang sudah optimal juga didukung oleh data Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang 2021 mencapai 83,73% dan mengalami peningkatan (Badan Ketahanan Pangan, 2021). Kabupaten Sumedang juga dalam jumlah produksi komoditas pertanian tanaman pangan tahun 2021 sebesar 608.190 ton dan realisasinya 764.539 ton atau capaian kinerja sebesar 125,71% terdiri dari padi dengan target jumlah produksi sebesar 387.374 ton dan realisasinya 478.554 ton atau capaian kinerja sebesar 123,54%, Jagung dengan target jumlah produksi sebesar 110.060 ton dan realisasinya 82.044 ton atau capaian kinerja sebesar 74,54% dan komoditas pangan lainnya. Hal ini mendukung bahwa ketersediaan stok pangan Kabupaten Sumedang sudah dapat tergolong tinggi dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Badan Pusat Statistika, 2021). Hal ini telah diteliti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azhar (2021) bahwa Kabupaten Sumedang memiliki potensi dalam sektor pertanian yang dapat membangun agroindustri dalam membangun ketahanan pangan.

Hasil Analisis terhadap Keterjangkauan Harga (*Affordability*)

Harga yang dimaksud adalah harga jual kepada konsumen dan harga jual di dalam setiap komponen di dalam sistem supply chain harus terintegrasi dan

melakukan koordinasi yang baik untuk dapat bersaing dengan sistem *supply chain* pesaing.

Petani yang melakukan budidaya padi biasanya tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga tawar. Harga ditentukan langsung oleh bandar maupun tengkulak. Hal ini disebabkan karena petani yang memiliki keterikatan bantuan modal terhadap tengkulak atau bandar tersebut. Keterikatan modal itu disebabkan oleh bantuan modal yang diberikan saat akan memulai budidaya.

Petani yang membudidayakan jagung lebih memiliki daya tawar yang baik, petani mendapatkan bimbingan langsung dari Kodim 0610/Sumedang dalam mencari bandar atau tengkulak yang memberikan nilai tawar yang menguntungkan untuk petani, sehingga petani mampun memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Bulog tidak dapat berperan terlalu besar karena harga yang ditawarkan Bulog lebih rendah dengan kualitas beras yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumedang. Selain itu, Bulog memiliki aturan-aturan yang sangat sulit disesuaikan oleh petani.

Hasil Analisis terhadap Kelancaran Distribusi (*continuity*)

Saluran distribusi mempunyai tujuan untuk membawa suatu produk ke suatu tempat (pasar) sehingga konsumen dapat memperoleh produk tersebut. Umumnya, saluran distribusi untuk komoditas pertanian sangat panjang yang akan menghubungkan dari produsen (petani) dimana produk pangan akan berpindah dari sisi produksi ke sisi konsumen akhir (Rahmawati, 2012).

Kabupaten Sumedang dalam pendistribusian produk pertaniannya belum memiliki atau tidak terdapat data valid dalam pemetaan distribusinya, sehingga tidak bisa ditentukan pengadaan dan penyerapan komoditas pangan khususnya padi dan beras yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan sinergisitas antara Dinas Pertanian dengan Dinas Perdagangan agar dapat memetakan distribusi untuk membangun kelancaran distribusi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) bahwa penerapan pemasok dengan melakukan strategi kompetisi antar pemasok sehingga menghasilkan kualitas beras yang baik dan target penyerapan terpenuhi sesuai kapasitas gudang yang dimiliki.

Hasil Analisis terhadap Hambatan Pelaksanaan *Supply Chain Management* Sektor Pertanian dalam Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang guna Mendukung Kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan

Kebijakan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Menurut Chopra & Meindl (2013) menyatakan bahwa sebuah rantai pasokan melibatkan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi permintaan konsumen. Rantai pasok mencakup tidak

hanya produsen dan pemasok, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri.

Supply chain management sektor pertanian dalam membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang saat ini memiliki banyak hambatan dan stakeholder terkait yakni Kodim 0610/Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta kelompok tani melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. *Supply chain management* pada objek penelitian merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Peneliti merumuskan hambatan berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *supply chain management*.

Hasil Analisis terhadap Ketersediaan Stok (*Availability*)

Kabupaten Sumedang dalam membangun ketahanan pangan guna mendukung kesiapan logistik wilayah sudah mampu memenuhi ketersediaan stok pangannya, namun untuk meningkatkan ketersediaan stok tersebut pemerintah harus memperhatikan terkait bantuan yang diberikan kepada petani. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Namun bantuan tersebut faktanya dapat membentuk karakter petani yang tidak mandiri, ketidaksesuaian penggunaan bantuan pun masih terjadi di para petani

Kabupaten Sumedang. Selain itu, sering kali bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan petani baik dari kualitas, kuantitas, maupun waktu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Yuningsih (2021) bahwa sering kali bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan petani dan masyarakat sehingga tidak efektif dan efisien.

Hasil Analisis terhadap Keterjangkauan Harga (*Affordability*)

Peneliti merumuskan menjadi 4 kelompok hambatan yang paling mendominasi dalam menjalankan parameter keterjangkauan harga sebagai berikut.

a. Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Kabupaten Sumedang masih memiliki masyarakat yang memiliki daya beli yang rendah seperti yang tertera pada hambatan dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Sumedang 2018-2023. Hal ini juga mempengaruhi rantai distribusi hasil produksi pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani Kabupaten Sumedang. Perbedaan kualitas yang dihasilkan dengan kemampuan daya beli masyarakat membuat distribusi komoditas pangan tidak dapat langsung diserap oleh masyarakatnya, sehingga distribusi produk pangan khususnya komoditas padi sering kali didistribusikan ke luar wilayah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya harus melakukan penyerapan dari wilayah lainnya.

b. Tingkat Kemiskinan Petani Masih Tinggi

Kemiskinan Sumedang di tahun 2021 yaitu 9,71% lebih tinggi dari

kemiskinan Jawa Barat. Dari persentasinya ini 50,01% berada pada sektor pertanian. Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai oleh petani. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan masih didominasi oleh masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian.

c. Tidak Memiliki Kemampuan Daya Tawar

Bargaining power atau daya tawar adalah kekuatan pengaruh relatif dari masing-masing pihak dalam negosiasi, perselisihan, atau pertukaran. Hal ini disebabkan keterikatan bantuan modal yang diberikan oleh bandar membuat petani lemah dalam *bargaining power*. Petani harus menerima keputusan harga dari tengkulak karena sudah melakukan perjanjian di awal saat akan melakukan penanaman. Petani tidak banyak memiliki pilihan karena kesulitan dalam mendapatkan modal selain dari bandar tersebut. Diversifikasi komoditas pun seharusnya dilakukan petani, namun petani Sumedang hanya ingin memproduksi beras saja. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan yang rendah dan budaya petani yang harus melakukan budidaya padi.

d. Biaya Budidaya yang Sangat Mahal

Biaya budidaya yang harus dikeluarkan oleh petani sangat tinggi sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor tingkat kesejahteraan petani yang

masih rendah. Selain itu, biaya sumber daya manusia yang sangat tinggi, pupuk yang mahal masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Hasil Analisis terhadap Kelancaran Distribusi (Continuity)

Peneliti merumuskan menjadi 3 kelompok hambatan yang paling mendominasi dalam menjalankan parameter kelancaran distribusi sebagai berikut.

1) Lembaga Non Formal Menguasai Pasar

Saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur yang dilalui oleh arus distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen akhir (Rahmawati, 2012). Distribusi komoditas pangan di Kabupaten Sumedang masih dirasa kurang efektif karena rantai pasok yang panjang dan nilai tambahan khususnya produsen pertama yaitu petani sangat sedikit. Hal ini disebabkan pasar yang masih dikuasai oleh Lembaga non formal seperti bandar, tengkulak, pengumpul kecil yang seringkali melemahkan daya tawar petani. Lembaga ini mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan nasib petani khususnya pada komoditas padi di Kabupaten Sumedang.

2) Kurangnya Sinergisitas antar Instansi Pemerintah

Sinergisitas merupakan salah satu metode dalam mencapai suatu target yang dicanangkan. Belum adanya sinergisitas antara Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dalam mengelola aliran distribusi khususnya komoditas pangan. Administrasi dan peraturan yang

rumit dan berbelit pun dapat menghambat dalam mencapai ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Saat ini sudah ada sinergisitas antara Dinas Pertanian dengan BUMD dalam membangun aliran distribusi yang efektif namun masih dalam skala kecil dan baru beberapa komoditas saja. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada peningkatan agar dapat memberikan efektif dan efisien dalam melakukan manajemen rantai pasok guna membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang.

3) Distribusi yang Kurang Efektif

Hal ini terjadi pada distribusi pangan di Kabupaten Sumedang yang memiliki rantai yang panjang. Pangan dari produsen ke konsumen dan harus melalui beberapa rantai pasok seperti bandar/tengkulak, pengumpul kecil, pengumpul besar sampai pada pasar induk dan ritel. Petani Sumedang dari data Susenas yang menggunakan internet hanya 14% saja. Butuh proses dalam mengembangkan skill dan teknologi dalam pertanian. Hal ini mendukung pada penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka (2020) menyatakan bahwa perlunya ada pemetaan rantai pasok dalam membangun ketahanan pangan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

Hasil Analisis terhadap Strategi Supply Chain Management Sektor Pertanian dalam Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang guna Mendukung Kesiapan Logistik Wilayah Pertahanan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu

tertentu. Strategi pelaksanaan supply chain management sektor pertanian dalam membangun ketahanan pangan guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan dapat dilakukan sebagai berikut:

Hasil Analisis terhadap Ketersediaan Stok (Availability)

Kodim 0610/Sumedang dalam meningkatkan ketersediaan stok dengan membangun program ketahanan pangan guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan. Membuka lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian khususnya untuk menanam komoditas pangan. Selain itu, Kodim 0610/Sumedang juga dapat membentuk karakter petani yang dapat melakukan budidaya secara tumpang sari tidak hanya berpatok pada satu komoditas saja. Pendapatan dan keuntungan petani pun dengan metode ini akan memberikan jumlah yang lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada satu komoditas saja. Hal ini sesuai dengan penelitian Quaralia (2022) bahwa ketahanan pangan nasional merupakan hal yang penting sehingga rantai pasok makanan bidang pertanian harus diperhatikan khususnya dalam peningkatan stok yang dapat dilakukan pembinaan pada pelaku budidaya yaitu petani.

Hasil Analisis terhadap Keterjangkauan Harga (Affordability)

Strategi dalam meningkatkan keterjangkauan harga dilakukan oleh Kodim 0610/Sumedang bersama kelompok tani dengan membangun kekuatan daya tawar. Pemutusan rantai pasok menjadi salah satu upaya dalam

meningkatkan harga komoditas yang dihasilkan. Tidak hanya Kodim 0610/Sumedang, Dinas Pertanian juga dapat melakukan pemutusan rantai pasok dalam meningkatkan harga hasil produksi khususnya untuk komoditas padi.

Strategi menjaga harga kepada konsumen agar tetap stabil merupakan salah satu tugas dan peran Bulog. Bulog dapat hadir ketika bahan pokok meningkat secara tajam dengan mengeluarkan produk pangan secara komersil untuk menurunkan harga pangan dipasaran, begitu pun jika harga pangan menurun tajam Bulog akan melakukan penyerapan terhadap pangan tersebut.

Sejalan dengan pernyataan Anugrah (2021) bahwa kondisi sektor pertanian yang tidak stabil sering menimbulkan jumlah produk tidak bisa dipasarkan, harga produk menurun dan pada akhirnya para petani mengalami kerugian usaha tani.

Hasil Analisis terhadap Kelancaran Distribusi (Continuity)

Pemotongan rantai pasok merupakan salah satu strategi efektif yang dalam memperbaiki kelancaran distribusi. Pemotongan rantai pasok yang dilakukan oleh Kodim 0610/Sumedang dalam membangun ketahanan pangan guna mendukung kesiapan logistik wilayah dilakukan dengan memutus rantai bandar dan pengumpul kecil maupun besar yang dapat dilakukan kepada komoditas pangan lainnya. Hasil produksi petani langsung dijual kepada konsumen yang membutuhkan untuk dijadikan faktor produksi usahanya kembali.

Penjualan komoditas jagung yang sudah dipipil langsung kepada peternak ayam yang diajdikan sebagai pakan. Hal ini sangat efektif untuk meningkatkan harga dan keuntungan yang didapatkan oleh petani. Selain Kodim 0610/Sumedang, Dinas Pertanian pun melakukan strategi dengan membuat kerjasama bersama BUMD dalam memutus rantai pasok yaitu melakukan pemasaran hasil produksi komoditas padi kepada pasar induk untuk memenuhi permintaan pasar induk tersebut menjadi strategi yang dapat diterapkan untuk seluruh kelompok tadi dan komoditas pangan lainnya. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil. Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) penerapan banyak pemasok dengan melakukan strategi kompetisi antar pemasok sehingga menghasilkan kualitas beras yang baik dan target penyerapan terpenuhi sesuai kapasitas gudang yang dimiliki.

KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka supply chain management sektor pertanian dalam membangun ketahanan pangan Kabupaten Sumedang guna mendukung kesiapan logistik wilayah pertahanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Sumedang sudah mampu memenuhi parameter

ketersediaan stok pangan namun masih memiliki kendala dalam parameter keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi;

- 2) Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hambatan untuk ketersediaan stok (ketidakmandirian petani), keterjangkauan harga (rendahnya daya beli masyarakat, petani tidak memiliki daya tawar, tingginya tingkat kemiskinan petani dan biaya faktor produksi) dan kelancaran distribusi (lembaga non formal masih menguasai pasar, kurangnya sinergisitas antar instansi pemerintah dan distribusi yang kurang efektif);
- 3) strategi yang dapat dilaksanakan menggunakan strategi SCM yaitu ketersediaan stok (pembukaan lahan, tumpangsari dan integrated Farming), keterjangkauan harga (pemutusan rantai pasok, memaksimalkan peran bulog) dan kelancaran distribusi (pemasaran, pengembangan sistem distribusi dan pemanfaatan teknologi).

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Iwan S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 pada Dinamika Rantai Pasok Pangan Pokok. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Azhar, N., Kastaman, R., & Bunyamin, A. (2021). Penentuan Produk Agroindustri unggulan di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 840–851.

- <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.2>
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2017). Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia Meningkat. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- _____. (2021). Indeks Ketahanan Pangan 2021.
- Badan Pusat Statistika. (2020). Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2020.
- _____. (2021a). Total Impor Jagung dari Negara-Negara Utama 2021.
- _____. (2021b). Luas Lahan Sawah (Hektar), 2019-2021.
- _____. (2021c). Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (Persen), 2019-2021.
- _____. (2021). Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021
- Bappappeda Kabupaten Sumedang & Universitas Padjadjaran. (2020). Kajian Penangan Dampak Ekonomi Pasca Covid-19 Kabupaten Sumedang (Laporan Ak).
- Ceha, R., Dzikron, M., Muhamad, C. R., Syahmi, M. F., & Riyanto, S. (2019). The Proposal of West Java Export Coffee Distribution Model. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 1(35), 221–234. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4428>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2013). Understanding the Supply Chain. In *Economic Annals* (Vol. 51, Issue 170). Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.2298/ekao670067a>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Y. R. (2020). Analisis Implementasi Manajemen Rantai Pasok Beras di Perum Bulog Gudang Singakerta Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. (2020). Petani Ganjaresik Penuhi Kebutuhan Jagung 20 Ton Perhari. Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- _____. (2021). Target Produksi Padi Harus 387 Ribu Ton. Pemerintah Kabupaten Sumedang
- Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. (2017). Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2017.
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat Di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, Universitas Pertahanan.
- Kusuma, E. (2021). Relevansi Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut terhadap Terwujudnya Wilayah Pertahanan yang Bertumpu pada Pulau-Pulau Besar (Studi Kasus Pada Lantamal III/Jakarta). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5).
- Lutfiyanto, & Prihantini, C. I. (2019). Analisis Persepsi Stakeholder Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprota) Pupuk Di Kabupaten Pamekasan. *J. Agroland*, 26(3), 294–307.

- Manggala, P. U. (2016). Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26*. http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_26_Juni_2016.pdf
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*.
- Muhandhis, I., & Suryani, E. (2015). Pengembangan Model Rantai Pasok Produksi Beras. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII*, 978-602-70604-2-5, 1-8.
- Pitaloka, Maria Dyah Ayu Sudarya, A., & Saptono, E. (2021). Manajemen Ketahanan Pangan melalui Program Diversifikasi Pangan di Sumatera Utara dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara. *7(2)*, 58-83.
- Quaralia, P. (2022). Kerja Sama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai kerja Sama Regional dalam rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Studi kasus ASEAN View project Freeport Indonesia Implementation on Environmental Security . *Article in Padjadjaran Journal of International Relations*, February. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.37614>
- Rahmawati, E. (2012). Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(3).
- Rasmikayati, E., Djuwendah, E., Mukti, G. W., Saefudin, B. R., & Wati, F. (2021). Deskripsi Kegiatan Disertai Identifikasi Potensi dan Kendala Kelompok Tani dalam Usahatani Mangga (Studi Kasus di Kelompok Tani Datar Indah dan Samoja). *Agri Wiralodra*, 13(1), 7-16. <https://doi.org/10.31943/agriwiralodra.v13i1.15>
- Ritonga, U. S. (2018). Dinamika Komoditas Berbasis Keunggulan Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Agriфо : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.29103/ag.v3i1.774>
- Siswandi, Wiranatha, S., & Hartiati. (2019). Pengembangan Manajemen Rantai Pasok Kopi Arabika Kintamani Bali. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i01.p12>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186-194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Sulistyowati, L. (2011). Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan. *Cemara*, 8(1), 20-30.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

- Woods, E. J. (2013). Supply chain management: Understanding the Concept and its Implications in Developing Countries. Proceeding of Workshop.
- Yuningsih, Y., & Yuliani, W. (2021). Pemberdayaan Bantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Pamulihan di Desa Haurngombong selama Pandemi Covid-19. Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1(November).